

**KERJASAMA GEREJA KATOLIK DI KEUSKUPAN AGUNG JAKARTA DAN
SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP DI JAKARTA DALAM MENDORONG
PERUBAHAN SOSIAL TERHADAP KESADARAN MENJAGA LINGKUNGAN
HIDUP DI DKI JAKARTA**

**Adrian Alexsander Johannes¹, Samuel Christian Hasiholan Siahaan², Nebraska Yudha Frans
Kaawoan³**

^{1,2,3}Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia

Email Korespondensi: johannesadrian123@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the roles of the Catholic Church within the Archdiocese of Jakarta and the Jakarta Provincial Government in fostering public ecological awareness regarding environmental preservation. The research aims to analyze how the Catholic Church, as part of civil society, plays a role in building ecological awareness among the congregation and to identify the forms of collaboration established with the Sub-agency for the Environment (Sudin Lingkungan Hidup). A qualitative research method was employed, utilizing interviews, literature reviews, and observations. The findings indicate that the Church serves as a platform for community engagement through homilies, seminars, and concrete actions such as waste banks and eco-enzyme production, while the Sub-agency for the Environment provides policies, technical guidance, and operational support through various local environmental units and task forces (PSM, Satpel LH, and PPSU). The congregation acts as active implementers on the ground, participating in waste sorting activities and efforts to reduce single-use plastics. The study concludes that synergy among the Church, the government, and the community is the key to successfully fostering a sustainable ecological culture.

Keywords: Catholic Church, Sub-agency for the environment, Environmental preservation.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran Gereja Katolik di Keuskupan Agung Jakarta dan Pemerintah DKI Jakarta dalam mendorong kesadaran ekologis masyarakat terhadap penjagaan lingkungan hidup. Tujuan penelitian adalah menganalisis bagaimana Gereja Katolik sebagai bagian dari masyarakat sipil berperan dalam membangun kesadaran ekologis umat serta bentuk kerjasama yang terjalin dengan Sudin Lingkungan Hidup. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan wawancara, studi literatur dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gereja berperan sebagai wadah komunitas sosial melalui homili, seminar, dan aksi nyata seperti bank sampah dan ecoenzyme, sementara Sudin LH hadir dengan kebijakan, pendampingan teknis, serta dukungan operasional melalui PSM, Satpel LH, dan PPSU. Komunitas umat menjadi pelaksana aktif di lapangan, terlibat dalam kegiatan pemilahan sampah dan pengurangan plastik sekali pakai. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa sinergi antara Gereja, pemerintah, dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan dalam membangun budaya ekologis yang berkelanjutan.

Kata kunci: Gereja Katolik, Sudin lingkungan hidup, Penjagaan lingkungan hidup.

PENDAHULUAN

Isu lingkungan menjadi sebuah tantangan yang dihadapi oleh setiap negara-negara yang ada di dunia ini, di masa kini yang sangat mulai terus menuntut ruang lingkup hidup alami dan yang sehat untuk keberlangsungan hidup manusia di dunia, kerusakan lingkungan seperti perubahan iklim, pencemaran udara, deforestasi, serta krisis air bersih menunjukkan bahwa persoalan lingkungan tidak hanya berkaitan dengan aspek ekologis semata, tetapi juga memiliki dimensi politik yang kuat dalam kondisi internasional isu lingkungan menjadi sebuah topik pembahasan yang penting *World Health*

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

457

Indexed

SINTA 4



Organization (WHO) menegaskan bahwa kondisi lingkungan yang tidak sehat seperti polusi udara, air yang terkontaminasi, serta paparan bahan kimia berbahaya dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit. WHO menyatakan bahwa sekitar 13 juta kematian setiap tahun di dunia berkaitan dengan faktor lingkungan yang dapat dicegah, seperti polusi udara, sanitasi yang buruk, dan perubahan iklim. Penyakit yang sering muncul akibat kondisi lingkungan yang buruk antara lain penyakit jantung, stroke, kanker paru-paru, diare, dan penyakit pernapasan kronis. (WHO, 2023)

Isu politik lingkungan juga menjadi perhatian penting dalam pembangunan di Indonesia. Berbagai permasalahan seperti polusi udara, pengelolaan sampah, kerusakan hutan, dan banjir menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan membutuhkan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah Indonesia sendiri telah membentuk berbagai kebijakan dan lembaga untuk menangani persoalan ini, seperti melalui Kementerian Lingkungan Hidup yang bertugas merumuskan serta menjalankan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Namun, implementasi kebijakan tersebut seringkali memerlukan dukungan dari masyarakat sipil agar dapat berjalan secara efektif. Dalam konteks Jakarta sebagai kota metropolitan dan padat penduduk isu lingkungan yang terjadi tentang kebersihan lingkungan terhadap pengolahan sampah dan juga polusi udara yang memberikan efek buruk terhadap kualitas hidup masyarakat di DKI Jakarta, pengelolaan sampah dan penjagaan kualitas udara di DKI Jakarta menjadi tanggung jawab pemerintah dan juga setiap masyarakat di DKI Jakarta untuk menciptakan sebuah ruang hidup yang sehat agar meningkatkan kualitas hidup yang lebih nyaman dan ramah lingkungan, peran pemerintah dan masyarakat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kualitas hidup di DKI Jakarta.

Dalam konteks masyarakat sipil, salah satu yang memegang peran penting adalah institusi keagamaan memiliki peran penting dalam mendorong kesadaran dan tindakan kolektif terhadap isu lingkungan. Dalam sejarah Gereja Katolik, Gereja memiliki sebuah doktrin pengajaran bagi umat untuk melaksanakan nilai-nilai Ketuhanan dalam konteks sosial yang disebut sebagai *Doctrina Socialis Ecclesiae* merupakan sebuah kumpulan berkas yang menekankan prinsip moral Katolik terhadap kepedulian untuk masyarakat dan lingkungan dengan menekankan prinsip seperti keadilan sosial, kesejahteraan bersama, solidaritas dan tanggung jawab manusia dalam merawat ciptaan alam. (*Pontifical Council for Justice and Peace*, 2004 : 9-10)

Gereja Katolik di Keuskupan Agung Jakarta, misalnya, dalam beberapa tahun terakhir semakin aktif mengkampanyekan tanggung jawab moral terhadap kelestarian alam. Hal ini salah satunya ditegaskan dalam ensiklik *Laudato Si'* yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus. (Lai, 2025) Dokumen tersebut menekankan pentingnya “pertobatan ekologis” dan mendorong umat Katolik untuk terlibat aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab iman dan sosial. pentingnya sinergitas Kerjasama antara pemerintah dan organisasi keagamaan sebagai komunitas menjadi hal yang memiliki dasar sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam undang-undang peran masyarakat menjadi hal yang sangat didukung untuk menjaga lingkungan hidup dan mendapatkan kenyamanan lingkungan yang layak serta dijamin oleh pemerintah sebagai penjamin, penegak aturan hukum dan tempat untuk membangun Kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat sipil dalam hal ini Gereja Katolik sebagai wadah umat beragama Katolik untuk ikut juga terlibat aktif dalam kegiatan penjagaan lingkungan hidup terkhusus di DKI Jakarta. lebih lanjut lagi undang-undang juga diturunkan melalui Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber menegaskan kewajiban seluruh masyarakat DKI Jakarta untuk melakukan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga, sekolah, kantor, hingga tempat ibadah. Dengan aturan ini, sampah dipilah menjadi empat kategori utama: organik, anorganik, B3 (berbahaya dan beracun), serta residu. Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup, Satpel LH, PPSU, dan kader lingkungan diberi mandat untuk mendampingi masyarakat, menyediakan sarana, serta memastikan pemilahan berjalan konsisten. Kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada teknis pengelolaan sampah, tetapi juga pada perubahan paradigma masyarakat dari pola lama “kumpul-angkut-buang” menjadi pola baru “kurangi-pilah-olah.” Dengan demikian, Ingub No. 5 Tahun 2026 menjadi dasar hukum yang memperkuat gerakan ekologis

di Jakarta, sekaligus membuka ruang kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga keagamaan seperti Gereja Katolik untuk membangun budaya ekologis yang berkelanjutan.

Transformasi budaya masyarakat dalam mengelola sampah secara mandiri menandai proses rekayasa sosial yang kompleks dan tidak mungkin bertumpu pada otoritas birokrasi pemerintah saja. Dinamika perubahan tersebut menuntut peran aktif aktor masyarakat sipil (*civil society*) demi menjaga kesinambungan gerakan di tingkat bawah. Konsep *civil society* dalam pemikiran Jürgen Habermas menegaskan bahwa entitas yang hidup di ruang publik ini mempunyai kekuatan kultural untuk memengaruhi opini serta membentuk perilaku baru dalam gaya hidup publik. Peran sosiologis inilah yang dijalankan oleh Gereja Katolik Keuskupan Agung Jakarta (KAJ) di tengah krisis ekologi ibu kota. Melalui seruan moral teologis teologi "pertobatan ekologis" pada ensiklik *Laudato Si'*, Gereja menengahi dan mengoperasionalkan kebijakan lingkungan formal (seperti Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026) ke dalam tindakan nyata umatnya. Fenomena integrasi antara agenda struktural Suku Dinas Lingkungan Hidup dan gerakan kultural Gereja Katolik ini menjadi fokus kajian yang menarik untuk membedah sejauh mana institusi keagamaan efektif menggerakkan tindakan kolektif terhadap isu lingkungan perkotaan. (Habermas, 1996)

Dalam proses upaya Kerjasama yang dilakukan oleh Gereja Katolik di Keuskupan Agung Jakarta dengan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta memang sudah melakukan beberapa upaya yang dilakukan untuk menjaga lingkungan hidup secara kolaboratif seperti dengan memberikan dukungan penurunan pasukan Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang bertugas pada saat perayaan Natal tahun 2025 untuk ikut aktif membantu membersihkan paroki-paroki yang melaksanakan ibadah perayaan Natal. (Fakhri, 2025)

Proses yang berjalan tidak hanya berkala pada tentang keaktifan untuk menjaga lingkungan namun juga melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai pengelolaan sampah, pemilihan sampah implementasi ruang terbuka hijau di Gereja dan sekolah-sekolah swasta Katolik untuk terutama umat Katolik di setiap Paroki di DKI Jakarta yang dilaksanakan kerjasama oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Bimas Katolik RI sebagai upaya kerjasama yang dilakukan untuk mengikut sertakan peran masyarakat terkhusus umat Katolik dalam menjaga lingkungan terutama di DKI Jakarta. (Xaverius, 2025)

Rumusan masalah dalam penelitian ini berangkat dari meningkatnya perhatian terhadap persoalan lingkungan hidup di wilayah perkotaan, khususnya di DKI Jakarta yang menghadapi berbagai tantangan seperti polusi udara, krisis pengelolaan sampah, dan penurunan kualitas lingkungan. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa upaya pelestarian lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan berbagai aktor masyarakat sipil, termasuk lembaga keagamaan. Gereja Katolik dalam beberapa tahun terakhir semakin mendorong kesadaran ekologis sebagai bagian dari tanggung jawab moral terhadap alam, sebagaimana ditegaskan dalam dokumen Gereja seperti *Laudato Si'* yang menyerukan pentingnya menjaga "rumah bersama" melalui perubahan sikap dan tindakan manusia terhadap lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana peran Gereja Katolik dalam mendorong kesadaran ekologis serta bagaimana bentuk keterlibatan dan kerja sama antara Gereja Katolik dan pemerintah dalam upaya menjaga lingkungan hidup di DKI Jakarta.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Gereja Katolik dalam upaya pelestarian lingkungan hidup di DKI Jakarta, khususnya melalui berbagai ajaran dan gerakan ekologis yang berkembang di kalangan umat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji keterlibatan Gereja Katolik sebagai bagian dari masyarakat sipil dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan, serta mengidentifikasi bentuk upaya kerja sama yang terjalin antara pemerintah daerah DKI Jakarta dengan Gereja Katolik Keuskupan Agung Jakarta. Urgensi penelitian ini terletak pada keterbatasan pola penanganan sampah konvensional dan regulasi formal pemerintah dalam mengimbangi tantangan lingkungan di DKI Jakarta akibat rendahnya kepatuhan masyarakat. Oleh karena itu, mengkaji sinergi antara kebijakan struktural negara dan pendekatan kultural-spiritual komunitas keagamaan menjadi sangat penting dilakukan saat ini. Langkah tersebut diperlukan untuk menemukan formula rekayasa sosial yang efektif dalam mengubah perilaku masyarakat demi keberlanjutan ekologi kota.

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara akademis maupun praktis dalam memahami peran lembaga keagamaan dalam isu lingkungan hidup. Secara akademis, penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai politik lingkungan dan peran masyarakat sipil dalam mendukung kebijakan lingkungan, khususnya dengan melihat keterlibatan Gereja Katolik sebagai salah satu aktor sosial yang berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan. Kajian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas hubungan antara agama, masyarakat sipil, dan kebijakan lingkungan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bentuk kerja sama yang dapat dibangun antara lembaga keagamaan dan pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dari perspektif partisipan, dengan peneliti sebagai instrumen utama. Jenis penelitian yang diterapkan adalah eksplanatif untuk mengkaji hubungan sebab-akibat, khususnya pengaruh kerja sama antara Gereja Katolik di Keuskupan Agung Jakarta (KAJ) dan Suku Dinas Lingkungan Hidup terhadap pembangunan kesadaran ekologis jemaat dan masyarakat. Data penelitian bersumber dari dokumen internal gereja terkait kesadaran lingkungan, pemberitaan media massa mengenai program kemitraan, serta hasil observasi lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan wawancara mendalam dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta serta perwakilan paroki di wilayah KAJ. Data berupa kata-kata, tindakan, dan dokumen tersebut kemudian dianalisis secara induktif untuk mendeskripsikan serta menjelaskan implementasi serta dampak dari kolaborasi yang terjalin. (Sugiyono, 2016)

PEMBAHASAN

Peran Gereja dan Pemerintah bersama Masyarakat dalam Penjagaan Lingkungan Hidup

Penjagaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama yang tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Kompleksitas permasalahan lingkungan, seperti pengelolaan sampah, pencemaran, dan menurunnya kualitas lingkungan hidup dalam konteks ini, Gereja, pemerintah, dan masyarakat memiliki peran yang saling melengkapi dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi dan partisipasi aktif dari ketiga unsur tersebut, upaya penjagaan lingkungan hidup dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana peran Gereja, pemerintah, dan masyarakat saling berinteraksi serta berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup berdasarkan temuan penelitian yang diperoleh di lapangan.

Dalam proses menjaga lingkungan hidup terutama di DKI Jakarta dan terkhusus di wilayah Gereja Katolik di bawah naungan Keuskupan Agung Jakarta, melalui hasil observasi dan wawancara menemukan beberapa bentuk peran yang dilakukan oleh setiap Gereja, yang memiliki tujuan untuk mengusahakan agar lingkungan Gereja bersih dan ramah lingkungan sesuai dengan arah dasar KAJ tahun 2026, peran utama Gereja Katolik dalam penjagaan lingkungan hidup adalah sebagai penggerak dalam membangun kesadaran ekologis umat. Gereja tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keagamaan yang menyampaikan ajaran iman, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang mendorong umat untuk memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Melalui berbagai kegiatan pastoral, pendidikan, dan pendampingan umat, Gereja berupaya menanamkan pemahaman bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual setiap manusia. Dalam konteks ini, Gereja tidak semata-mata berfokus pada kegiatan teknis seperti membersihkan lingkungan atau mengelola sampah, melainkan berusaha membentuk pola pikir, sikap, dan nilai-nilai yang mendukung terciptanya kesadaran ekologis yang berkelanjutan. Kesadaran tersebut diharapkan dapat memengaruhi cara pandang umat dalam mengambil keputusan sehari-hari, baik dalam pola konsumsi, pengelolaan sampah, maupun penggunaan sumber daya alam secara bijaksana. Gereja juga menekankan pentingnya keteladanan sebagai sarana pendidikan yang efektif. Di tengah kondisi umat Katolik yang merupakan kelompok minoritas di masyarakat, Gereja memandang bahwa memberikan contoh nyata melalui perilaku ramah lingkungan memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan sekadar imbauan atau

sosialisasi. Oleh karena itu, berbagai praktik seperti pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, penggunaan tumbler, pemilahan sampah, dan kegiatan pelestarian lingkungan lainnya terus didorong agar menjadi budaya hidup umat sekaligus menjadi inspirasi bagi masyarakat sekitar dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Dalam proses menjalankan kolaborasi Gereja dan masyarakat dalam penelitian ini dapat ditemukan pada sebuah komunitas yang mendukung menjadi pihak ketiga dalam mewujudkan lingkungan hidup dan mengsosialisasikan langkah-langkah untuk merawat lingkungan hidup salah satu komunitas masyarakat yang bekerjasama dengan Gereja ialah komunitas “Daoer Zenee” yang memiliki tugas melakukan kerjasama antar paroki dan juga tingkat Keuskupan Agung Jakarta merupakan sebuah gerakan sosial kreatif yang lahir dari kepedulian terhadap lingkungan sekaligus semangat pemberdayaan masyarakat. Komunitas ini berfokus pada pengolahan limbah rumah tangga, seperti kertas dan kulit telur, menjadi produk kerajinan tangan yang memiliki nilai ekonomi. Lebih dari sekadar aktivitas daur ulang, Daoer Zenee menjadi wadah inklusif bagi kelompok rentan seperti disabilitas, lansia, transpuan, dan ibu tunggal untuk berkarya, memperoleh penghasilan tambahan, serta membangun rasa percaya diri.

Peran Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara sebagai aktor pelaksana dalam penjagaan lingkungan sangat sentral. Mereka menjadi pihak utama yang mengoordinasikan, mengatur, dan mengeksekusi seluruh kegiatan terkait pengelolaan lingkungan di wilayah Jakarta Utara. Dinas ini bertanggung jawab untuk memastikan kebijakan pemerintah mengenai pengelolaan sampah dan pencemaran lingkungan dapat diterapkan secara nyata di masyarakat. Sebagai pelaksana, Sudin LH menurunkan tim PSM (Peran Serta Masyarakat) yang langsung hadir di lapangan untuk melakukan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan masyarakat. Mereka juga menyiapkan personil serta armada kebersihan, terutama dalam momentum tertentu seperti perayaan besar, agar kebersihan tetap terjaga. Selain itu, Sudin LH berperan dalam koordinasi lintas unit internal, seperti Satpel LH kecamatan dan PPSU, sehingga kegiatan lingkungan dapat berjalan efektif dan terintegrasi.

Pendampingan berkelanjutan menjadi kunci agar masyarakat tidak hanya sekali mengikuti program, tetapi tetap konsisten dalam praktik sehari-hari. Sudin LH juga berperan dalam koordinasi lintas pihak dengan Satpel LH kecamatan, PPSU, dan kader lingkungan untuk mendukung kebersihan, terutama menjelang perayaan besar. Mereka menyiapkan personil dan armada kebersihan untuk memastikan lingkungan tetap terjaga. Peran penting lainnya adalah menindaklanjuti kebijakan pemerintah, seperti Instruksi Gubernur No. 5 Tahun 2026 tentang pemilahan sampah dari sumber. Melalui kebijakan ini, Sudin LH mendorong masyarakat untuk mengurangi sampah sejak dari rumah, sekolah, gedung pemerintah, hingga tempat umum. Keseluruhan peran ini menunjukkan bahwa Sudin LH Jakarta Utara bukan hanya pelaksana teknis, tetapi juga penggerak utama perubahan budaya masyarakat menuju kondisi lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Secara garis besar peran utama Sudin Lingkungan Hidup adalah mengelola sampah, mengedukasi masyarakat, melakukan pendampingan berkelanjutan, mengendalikan pencemaran, berkoordinasi lintas pihak, serta mendorong perubahan paradigma masyarakat menuju Indonesia Asri.

Aktor Pelaksana di dalam Gereja dan Pemerintah

Keberhasilan penjagaan lingkungan hidup tidak terlepas dari keterlibatan berbagai aktor yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Dalam konteks penelitian ini, pelaksanaan kegiatan penjagaan lingkungan melibatkan unsur internal Gereja maupun pihak pemerintah yang berinteraksi dalam berbagai bentuk kegiatan. Aktor pelaksana menjadi unsur penting karena berperan dalam menggerakkan, mengoordinasikan, serta melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan penjagaan lingkungan hidup. Keterlibatan aktor-aktor tersebut tidak hanya berasal dari lingkungan internal Gereja, tetapi juga dari unsur pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup di masyarakat.

Pelaksanaan penjagaan lingkungan di Gereja Katolik melibatkan berbagai aktor yang bekerja secara berjenjang dan kooperatif. Pastor Paroki berperan sebagai pengarah dan pengambil kebijakan yang mendorong penerapan prinsip-prinsip ramah lingkungan dalam setiap kegiatan gereja. Dalam

pelaksanaannya, Pastor didukung oleh Seksi Lingkungan Hidup yang bertanggung jawab menjalankan berbagai program lingkungan seperti bank sampah, pengolahan eco-enzyme, penghijauan, dan kegiatan kebersihan lingkungan.

Selain itu, terdapat Seksi Teritorial dan pengurus lingkungan yang berfungsi menyampaikan materi pembinaan serta menggerakkan umat di tingkat lingkungan untuk terlibat dalam kegiatan pelestarian lingkungan. Pelaksanaan program lingkungan juga dikoordinasikan oleh Dewan Paroki Harian dan TSBH Keuskupan Agung Jakarta

Aktor Pelaksana dalam Suku Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat memang di kendalikan penuh dari dinas, namun dalam pelaksanaan lapangannya seksi bidang Peran Serta Masyarakat (PSM) memainkan peran penting dalam PSM menjadi ujung tombak dalam menjalankan program-program lingkungan yang telah dirancang oleh dinas. Mereka hadir secara langsung untuk memberikan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan kepada masyarakat terkait pemilahan sampah, pengomposan, serta pengelolaan sampah elektronik. PSM memastikan bahwa kebijakan dan arahan dari Sudin LH benar-benar diterapkan oleh warga dan jemaat, sehingga tidak berhenti hanya pada tataran administratif. Dalam praktiknya, PSM berkoordinasi dengan unit lain seperti Satpel LH kecamatan, PPSU, dan kader lingkungan, namun tetap memegang peran inti sebagai representasi dinas di lapangan. Mereka bertugas menyiapkan kegiatan, mengatur personil, serta melakukan monitoring berkelanjutan agar masyarakat konsisten menjalankan pola pengelolaan sampah yang baru.

Bentuk Upaya dan Pelaksanaan Gereja Katolik dan Suku Dinas Lingkungan Hidup dalam Penjagaan Lingkungan Hidup

Dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, Gereja Katolik di Keuskupan Agung Jakarta tidak berjalan sendiri. Upaya yang dilakukan selalu melibatkan sinergi antara Gereja, umat, dan pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Kolaborasi ini menjadi penting karena kompleksitas masalah lingkungan tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja. Gereja berperan sebagai penggerak kesadaran umat, sementara pemerintah hadir sebagai fasilitator kebijakan dan dukungan teknis. Melalui kerja sama ini, berbagai bentuk kegiatan seperti sosialisasi, edukasi, pengelolaan sampah, hingga penghijauan dapat dilaksanakan secara lebih terarah dan berkelanjutan. Subbab ini akan menguraikan bagaimana bentuk upaya konkret yang dilakukan Gereja bersama pemerintah, serta bagaimana pelaksanaannya di tengah masyarakat.

Gereja Katolik memiliki peran penting sekaligus upaya nyata dalam menjaga lingkungan. Gereja berperan sebagai penggerak kesadaran ekologis umat dengan menyampaikan isu lingkungan melalui homili, misa, APP, bulan keluarga, seminar, serta memanfaatkan media digital seperti WA Group, video, podcast, dan TV selasar gereja. Selain itu, Gereja mengorganisir umat lintas kelompok keluarga, kaum muda, lansia, ketua lingkungan, korwil, dan seksi-seksi paroki agar terlibat aktif dalam gerakan peduli lingkungan.

Upaya yang dilakukan Gereja mencakup sosialisasi dan edukasi melalui pertemuan lingkungan, seminar, serta diskusi tentang keutuhan ciptaan. Dalam praktik nyata, Gereja mendorong umat untuk memilah sampah, menabung di bank sampah, mengolah sampah organik menjadi ecoenzyme, melakukan urban gardening, penanaman mangrove, Bank sampah serta bakti sosial bersih lingkungan. Gereja juga mengajak umat mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan membawa tumbler atau kotak makan sendiri.

Semua kegiatan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga diarahkan untuk membentuk pola pikir dan sikap pertobatan ekologis, sehingga menjaga lingkungan menjadi bagian dari iman dan tanggung jawab moral umat. Dengan demikian, Gereja berupaya membangun budaya hidup ramah lingkungan yang berkelanjutan, sekaligus menjadi teladan bagi masyarakat sekitar. Lebih lanjut lagi Gereja Katolik dalam arahan langsung Keuskupan Agung Jakarta. Dalam prosesnya hambatan dalam pelaksanaan program penjagaan lingkungan di tiga paroki memang beragam, namun semuanya menunjukkan tantangan yang nyata. Di Bidaracina, hambatan utama terletak pada kurangnya pemahaman umat mengenai teknis pemilahan sampah, sehingga sosialisasi harus dilakukan berulang kali agar umat

terbiasa. Selain itu, jarak ke bank sampah menjadi kendala praktis, terutama bagi lansia yang kesulitan membawa sampah terpilah ke lokasi yang cukup jauh. Di Rawamangun, hambatan lebih banyak terkait mentalitas kenyamanan umat, misalnya kebiasaan menggunakan plastik sekali pakai atau membeli makanan dengan kemasan praktis, karena dianggap lebih mudah dibandingkan membawa wadah sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan pola pikir dan kebiasaan sehari-hari masih menjadi tantangan besar. Paroki Pulomas terdapat hambatan yang lebih spesifik, yaitu letak gereja yang berada di tengah kawasan perumahan. Kondisi ini membuat paroki tidak memiliki lahan luas untuk menampung fasilitas pengelolaan sampah terpusat seperti bank sampah besar. Akibatnya, umat harus memilah dan mengelola sampah di rumah masing-masing atau bekerja sama dengan RT/RW setempat, sehingga intensitas penerapan program berbeda-beda antar lingkungan. Hambatan lain di Pulomas adalah sikap acuh sebagian umat yang merasa repot memilah sampah karena beranggapan bahwa sampah akan dicampur kembali oleh petugas. Faktor kenyamanan juga berpengaruh, misalnya lebih mudah menggunakan plastik sekali pakai dibandingkan membawa tumbler atau kotak makan sendiri.

Dalam hasil wawancara, setiap paroki memiliki cara tersendiri untuk mengatasi hambatan yang mereka hadapi dalam pelaksanaan program lingkungan. Di Bidaracina, hambatan berupa kurangnya pemahaman umat diatasi dengan sosialisasi berulang melalui homili, pertemuan lingkungan, dan seminar. Mereka juga menghadirkan narasumber dari luar, seperti komunitas bank sampah atau pemerhati lingkungan, agar umat memperoleh pengetahuan praktis dan lebih termotivasi. Di Rawamangun, hambatan mentalitas kenyamanan umat diatasi dengan pendekatan pastoral dan teladan nyata. Pastor serta pengurus lingkungan mendorong umat membawa tumbler atau kotak makan sendiri, mengurangi plastik sekali pakai, dan mengintegrasikan gerakan ekologis ke dalam kegiatan kategorial, sehingga umat melihat bahwa gaya hidup ramah lingkungan adalah bagian dari iman, bukan sekadar aturan teknis. Sementara di Pulomas, hambatan fisik berupa lokasi gereja yang berada di tengah perumahan diatasi dengan mendorong umat untuk memilah sampah di rumah masing-masing atau bekerja sama dengan RT/RW setempat. Hambatan mentalitas skeptis diatasi melalui edukasi berkelanjutan, dengan penekanan bahwa meski terbatas lahan, setiap keluarga tetap bisa berkontribusi. Gereja juga mendorong umat membawa wadah sendiri dan mengurangi plastik sekali pakai, sehingga perubahan dilakukan lewat kebiasaan sehari-hari.

Bentuk upaya yang dilakukan oleh Sudin Lingkungan Hidup Mereka menjalankan berbagai program pengelolaan sampah, seperti pendirian bank sampah, kampung iklim, KSBB persampahan, pengolahan sampah organik dengan magot, serta pengelolaan sampah elektronik. tetapi juga dengan memanfaatkan *Recycle Business Unit* (RBU) sebagai pusat pemrosesan sampah. RBU berfungsi sebagai fasilitas terpadu untuk mengolah sampah yang telah dipilah dari masyarakat, sehingga dapat diubah menjadi produk bernilai seperti kompos, pakan magot, maupun material daur ulang lainnya. Dengan adanya RBU, proses pengelolaan sampah menjadi lebih terstruktur karena sampah tidak hanya dikumpulkan, tetapi juga diproses secara langsung di unit tersebut.

Selain program teknis, Sudin LH juga melakukan sosialisasi dan edukasi secara rutin kepada masyarakat mengenai pemilahan sampah, pengomposan, dan perubahan paradigma pengelolaan sampah. Sosialisasi ini dilakukan baik secara langsung di lapangan maupun melalui media sosial resmi, dengan intensitas yang tinggi hingga beberapa kali dalam sehari. Mereka juga menekankan pentingnya pendampingan berkelanjutan agar masyarakat tetap konsisten menjalankan praktik ramah lingkungan.

Afiliasi Pemerintah dan Gereja dalam Kerjasama Penjagaan Lingkungan Hidup

Afiliasi kerjasama antara Sudin Lingkungan Hidup (LH) dan Gereja Katolik di Jakarta, sebagaimana tergambar dari hasil wawancara di berbagai paroki, menunjukkan pola kolaborasi yang erat dan saling melengkapi. Sudin LH memandang gereja sebagai mitra strategis karena rumah ibadah berfungsi sebagai pusat komunitas yang efektif untuk edukasi dan penggerakan umat. Gereja, melalui homili, seminar, kegiatan kategorial, hingga media sosial dan WA Group, menjadi corong penyadaran umat tentang pentingnya pemilahan dan pengelolaan sampah. Pemerintah hadir dengan dukungan teknis, kebijakan, serta pendampingan langsung melalui PSM, Satpel LH, dan PPSU, sementara gereja menggerakkan umat dengan otoritas moral dan spiritual.

Bentuk program yang dijalankan bersama meliputi pendirian bank sampah di gereja, sosialisasi pemilahan sampah, pengolahan sampah organik menjadi kompos atau ecoenzyme, serta pengelolaan e-waste. Di beberapa paroki seperti Santo Yakobus, Don Bosco, Pulomas, Rawamangun, dan Bidaracina, terlihat keterlibatan aktif umat yang membawa sampah terpilah ke gereja setiap minggu, bahkan menjadikan kegiatan tersebut bagian dari rutinitas ibadah. Pemerintah juga mendukung dengan kehadiran lurah atau petugas PPSU dalam acara sosialisasi dan kebersihan menjelang hari raya besar.

Pola komunikasi antara Gereja Katolik dan Dinas Lingkungan Hidup (Sudin LH) berlangsung dalam bentuk hubungan formal sekaligus informal yang saling melengkapi. Dari sisi formal, gereja biasanya mengirimkan surat resmi kepada Sudin LH untuk meminta pendampingan atau sosialisasi terkait program lingkungan. Setelah itu, Sudin LH menurunkan tim teknis seperti PSM, Satpel LH, dan PPSU untuk hadir langsung di gereja, memberikan edukasi, serta mendampingi umat dalam praktik pemilahan dan pengelolaan sampah. Pola ini memastikan ada jalur birokrasi yang jelas, sehingga kegiatan gereja tetap terintegrasi dengan kebijakan pemerintah daerah. Di sisi informal, komunikasi juga terjalin melalui hubungan personal dan komunitas. Romo dan seksi lingkungan hidup di paroki berperan sebagai penghubung utama, menyampaikan kebutuhan umat kepada Sudin LH, sekaligus meneruskan arahan pemerintah kepada jemaat. Sosialisasi dilakukan lewat homili, seminar, pertemuan lingkungan, hingga media digital seperti WA Group dan Instagram resmi Sudin LH. Dengan cara ini, pesan lingkungan tidak hanya berhenti pada level kebijakan, tetapi benar-benar masuk ke kehidupan umat sehari-hari.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi perilaku ekologis masyarakat dari pola konvensional '*kumpul-angkut-buang*' menjadi budaya '*kurangi-pilah-olah*' tidak dapat bertumpu pada intervensi kebijakan hukum formal pemerintah semata, melainkan membutuhkan peran aktif masyarakat sipil (*civil society*). Sinergi antara Suku Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta sebagai representasi otoritas struktural negara dan Gereja Katolik KAJ sebagai aktor kultural-keagamaan terbukti efektif menjadi lokus rekayasa sosial di tingkat tapak. Suku Dinas Lingkungan Hidup berperan penting dalam menyediakan regulasi, instrumen kebijakan (seperti Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026), serta fasilitas armada logistik. Sementara itu, Gereja Katolik KAJ bertindak sebagai jembatan sosiologis yang mengoordinasikan gerakan secara masif melalui pemanfaatan ruang publik (*public sphere*) dan jaringan parokial yang terstruktur. Keberhasilan kolaborasi ini terletak pada kemampuan Gereja dalam mentransmisikan aturan hukum formal negara menjadi kewajiban moral-spiritual umat melalui doktrin "pertobatan ekologis" yang bersumber dari ensiklik *Laudato Si'*. Proses internalisasi nilai tersebut memicu lahirnya tindakan kolektif dan perubahan gaya hidup praktis jemaat, seperti gerakan membawa tumbler, pemilahan sampah dari rumah, tabungan bank sampah, hingga pengolahan *eco-enzyme*. Sinergi dinamis ini membuktikan bahwa penguatan kapasitas kultural lembaga keagamaan di dalam ruang publik merupakan instrumen determinan dalam membangun kesadaran sosial dan menjamin keberlanjutan tata ruang hidup perkotaan yang adaptif terhadap krisis lingkungan.

REFERENSI

- Fakhri, F. (2025, Desember 12). Ribuan Petugas Kebersihan Dikerahkan Pastikan Jakarta Tetap Bersih saat Natal. Jakarta, Jakarta, Indonesia.
- Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge: MIT Press.
- Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber. (2026). Jakarta: Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.
- Kompedium Ajaran Sosial Gereja. (2004). Vatican, Vatican, Vatican City.
- Lai, Y. (2025, Desember 26). Jakarta archbishop urges ecological repentance in Christmas reflection. Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 8 Agustus 2026

- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. In Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (p. 2 dan 7). Bandung: Alfabeta, cv.
- World Health Organization. (2023, Oktober 12). Climate change.
- Xaverius, R. (2025, Desember 16). Perkuat Kepedulian Lingkungan, Ditjen Bimas Katolik Gandeng Kementerian Lingkungan Hidup Kelola Sampah Rumah Ibadah dan Lembaga Pendidikan Katolik.